

ISSN: 1412 – 2936
EISSN : 2549 - 7308

Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Lailatus Sa'adah¹
Adi Prasetyo²

STIE Malangkececwara Malang
ila@stie-mce.ac.id

Abstract

This study aims to: (1) determine whether the audit committee has an effect on tax avoidance. (2) to determine whether institutional ownership has an effect on tax avoidance. (3) to determine whether accounting conservatism affects tax avoidance. In this study the population is all coal companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2017-2018. Sampling using purposive sampling of 44 data, and the variables used are tax avoidance as an independent variable, while the audit committee, institutional ownership and conservatism accounting is the dependent variable. The analysis tool used multiple regression analysis. The test results prove that the audit committee and institutional ownership have a significant effect on tax avoidance, while accounting conservatism has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Corporate Governance, Audit Committee, Institutional Ownership, Accounting Conservatism, Tax Avoidance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (2) untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (3) untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2018. Pengambilan sampel menggunakan *purpusive sampling* sebanyak 44 data, dan variabel yang digunakan yaitu penghindaran pajak sebagai variabel independen, sedangkan komite audit, kepemilikan institusional dan konservatisme akuntansi adalah sebagai variabel dependennya. Alat analisis yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil pengujian membuktikan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Konservatisme Akuntansi, Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Bagi negara-negara yang ada di dunia terutama negara berkembang, pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Pajak merupakan beban yang mengurangi pendapatan bagi perusahaan, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal karena dengan beban pajak yang rendah berpengaruh pada jumlah laba yang dihasilkan.

Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), data menurut (*suara.com*) tahun 2017 setiap tahun penghindaran pajak mencapai Rp 110 Triliun yang menandakan kekurangan penerimaan pajak bisa terjadi adanya penghindaran pajak dan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*)

yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Governance*. Penelitian yang sebelumnya menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *Good Corporate Governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian sebelumnya juga mencoba mengaitkan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance* yang diprosikan melalui komite audit dan kepemilikan institusional (Sartori, 2010).

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan

kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Effendi, 2016).

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *reliable*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi berbeda (Damayanti, 2015).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau Lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional mengambil peran yang cukup besar dalam aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan yang kemudian akan berpengaruh

terhadap kebijakan pajak agresif sebuah perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham atas institusional yang mempunyai arus kas lebih memberikan dampak tarif pajak yang tinggi untuk perusahaan. Hal ini memberikan dampak pada sikap manajemen yang menginginkan pajak yang rendah untuk memaksimalkan jumlah laba perusahaan. Akan tetapi besarnya saham yang dimiliki institusi cukup besar, membuat institusi mempunyai peran untuk mengawasi, mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajer untuk tidak melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan sendiri (Winata, 2014).

Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan asset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*), yang nantinya pasti akan berpengaruh dengan pembayaran pajak perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Dalam

penelitiannya, pengukuran *corporate governance* dilakukan berdasarkan kepemilikan institusional dan komite audit. Hasil penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder institusional* akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (2) untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (3) untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. *Corporate governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja,

pertumbuhan, struktur pembiayaan perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat tepat waktu dan transparan mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan kepemilikan dan pemegang kepentingan (*stakeholder*) (Prasetyo, 2014).

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Desai dan Dharmapala, 2007). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Prasetyo, 2014).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham public yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Besarnya

kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (Kurniasih, 2012).

Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Nurindah, 2013).

Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Bapepam Nomor 29/PM/2004 yang

telah disempurnakan oleh Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomo I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, merupakan awal adanya Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia. Bagian tersebut menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan.

Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan dan efektivitas fungsi audit internal (IKAI, 2006)

Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi menurut glossary dalam FASB *Statement of Concept* adalah reaksi yang hati-hati terhadap ketidakpastian dengan mencoba meyakinkan bahwa ketidakpastian resiko yang ada pada kondisi bisnis cukup layak untuk di pertimbangkan, konservatisme merupakan prinsip yang paling mempengaruhi

penilaian dalam akuntansi. Definisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai asset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi. Konsep konservatisme menyatakan bahwa untuk menghindari kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang atau keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan mengambil suatu kebijakan, perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan harapan atas kejadian, konsekuensi atau hasil yang dianggap kurang atau tidak menguntungkan untuk perusahaan (Nurjannah, 2017).

Penghindaran Pajak

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang (UU), dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (UU No.28 Tahun 2007).

Dan peran pajak sangat besar bagi negara, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala, salah satunya adanya aktivitas penghindaran pajak atau

disebut *tax avoidance* yang dilakukan para Wajib Pajak pribadi maupun badan. Perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Aryani, 2017).

Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemilikinya maka ada upaya untuk penghindaran pajak (Chen, 2010). Secara hukum pajak, penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negative (Budiman dan Setiyono, 2012).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Berjalannya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan

yang efektif dan dapat mendukung adanya *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan *corporate governance* memiliki kemungkinan yang sangat kecil dalam melakukan penghindaran pajak karena memiliki pengawasan dan pengontrolan yang baik dalam perusahaan tersebut (Saputra dan Nur, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak terutang oleh perusahaan. Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2012) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (*short-term shareholder*) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak,

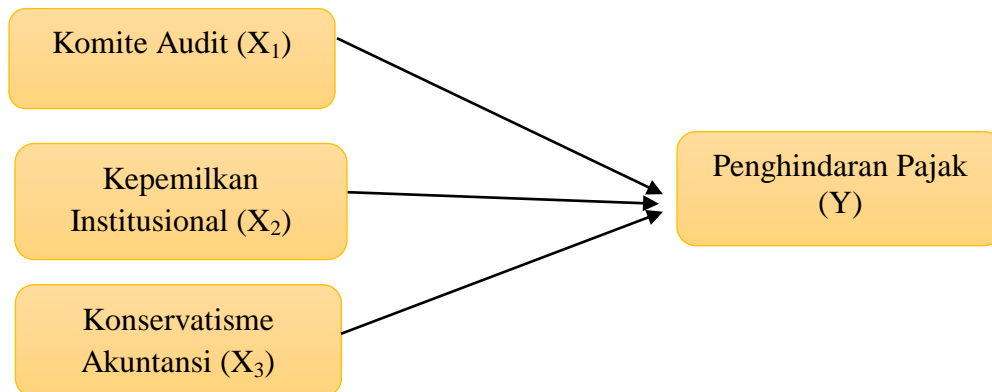
tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (*long-term shareholder*) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian pihak manajemen perusahaan dalam mengakui pendapatannya, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat terjadi kemungkinan akan terjadi. Penggunaan konservatis akuntansi akan menyebabkan angka-angka pada laporan laba-rugi ditetapkan rendah sehingga akan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Semakin rendah pendapatan yang diperoleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang akan dibayarkan, Novi (2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Gambar 2.1 Model Kerangka Penelitian**METODE PENELITIAN****Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2018. Untuk menentukan jumlah sampel, maka dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan metode *purpose sampling* dengan kriteria yang digunakan, antara lain: (1) Seluruh perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018 (2) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama dua tahun berturut-turut mulai periode 2017-2018 (3) Mengungkapkan data mengenai proporsi komite audit, kepemilikan institusional dan informasi beban pajak pada laporan keuangan tahunan selama dua tahun berturut-turut mulai periode 2017-2018, dengan jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan atau 44 data.

Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah Komite Audit (X₁) adalah

komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas didalam sebuah perusahaan dan membantu melaksanakan tugas fungsi Dewan Komisaris. Komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite audit dalam suatu perusahaan, mengacu pada penelitian (Hanum,2013) (2) Kepemilikan Institusional (X₂) adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Variabel kepemilikan institusional ini diukur dengan menggunakan rumus berdasarkan penelitian Kusumawardhani (2012) yaitu jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham beredar akhir tahun. (3) Konservatisme akuntansi (X₃) merupakan prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih

cepat, menilai asset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi. Pada penelitian ini konservatisme diukur berdasarkan model Givoly dan Hayn (2000) dengan rumus :

$$KNSV = \frac{(NIO + DEP - CFO) \times (-1)TA}{\dots}$$

Penghindaran Pajak (Y). Secara hukum pajak, penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negative Variabel Penghindaran Pajak ini diukur dengan model *Cash Effective Tax Rate* (Chen et al., 2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Metode Analisis

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan melakukan perhitungan, pengolahan dan penganalisaan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.066	.210		5.074	.000
	Komite Audit	-.182	.057	-.675	-3.171	.004
	Kepemilikan Institusional	-.275	.075	-.664	-3.665	.001
	Konservatisme Akuntansi	.008	.004	.351	1.991	.057

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1, persamaan regresi yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

$$CETR = 1,066 - 0,182X_1 - 0,275X_2 + 0,008X_3 + e$$

Analisis Regresi

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat digunakan persamaan sebagai berikut: $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$

Uji Statistik t

Uji statistik t dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial yang ditunjukkan pada tabel koefisien (Nazaruddin dan Basuki, 2017 dalam (Alfiani, 2019). Uji statistik t menggunakan tingkat $\alpha = 0,05$. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis alternatif tidak terdukung atau menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis alternatif terdukung atau menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dari Persamaan regresi dapat diambil kesimpulan bahwa α = Nilai *constant* adalah 1,066; artinya jika tidak terjadi perubahan variabel komite audit, kepemilikan institusional dan konservatisme akuntansi (nilai X_1 , X_2 , dan X_3 adalah 0) maka tingkat penghindaran pajak meningkat sebesar 1,066 satuan. β_1 = nilai koefisien komite audit adalah -0,182 artinya apabila nilai komite audit (X_1) meningkat sebesar 1% maka penghindaran pajak akan

berkurang sebesar 0,182 satuan. β_2 = nilai koefisien kepemilikan institusional adalah -0,275 artinya apabila kepemilikan institusional (X_2) meningkat sebesar 1% maka penghindaran pajak akan berkurang sebesar 0,275 satuan. β_3 = nilai koefisien konservatisme akuntansi adalah 0,008 artinya apabila konservatisme akuntansi (X_3) meningkat sebesar 1% maka penghindaran pajak akan bertambah sebesar 0,008 satuan.

Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.725 ^a	.526	.471	.067625	1.882

Sumber: Olah Data (2020)

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa nilai R square sebesar 0,526 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent sebesar 52,6%. Artinya variabel independent yang meliputi komite audit, kepemilikan institusional dan konservatisme akuntansi mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 52,6% sedangkan sisanya 47,4% dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tingkat signifikasi pada tabel 1, dapat disimpulkan (1) Komite Audit (X_1) mempunyai nilai t hitung sebesar -3.171 dengan tingkat signifikansi = 0,004 < 0,05,

sehingga dapat disimpulkan variable komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. (2) Kepemilikan Institusional (X_2) mempunyai nilai t hitung sebesar -3.665 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. (3) Konservatisme akuntansi (X_3) mempunyai nilai t hitung sebesar 1.991 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,057 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

Pembahasan

Komite Audit Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah diterima. Hasil ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulistian (2018) dan Astrian (2015) dimana komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menginterpretasikan bahwa peningkatan jumlah komite audit akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sebaliknya semakin sedikit jumlah komite audit maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga jika jumlah komite audit di perusahaan sedikit maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Penyebabnya adalah perusahaan yang memiliki komite audit berjumlah lebih dari satu memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif dan dapat mendukung adanya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan *good corporate governance* memiliki kemungkinan yang sangat kecil dalam

melakukan penghindaran pajak karena memiliki pengawasan dan pengontrolan yang baik dalam perusahaan tersebut.

Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah diterima. Hasil ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulistian (2018) dan Astrian (2015) dimana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menginterpretasikan bahwa peningkatan jumlah saham institusional akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sebaliknya semakin rendah jumlah kepemilikan saham institusional maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sehingga jika jumlah kepemilikan saham institusional dalam perusahaan rendah maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh institusional akan cenderung

membuat kinerja dari manajemen perusahaan diawasi oleh investor institusi tersebut, hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak terutang oleh perusahaan.

Konservatisme Akuntansi Tidak Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi $0,057 > 0,05$, sehingga tidak dapat memenuhi hipotesis ketiga (H_3) yang artinya ditolak, namun hasil tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramudito (2015) dan Tresno (2012) dimana konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menginterpretasikan bahwa konservatisme akuntansi bukanlah penyebab variabel yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Komite audit secara negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah komite audit di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Sehingga jika jumlah komite audit di perusahaan sedikit maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Penyebabnya adalah perusahaan yang memiliki komite audit berjumlah lebih dari satu memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif dan dapat mendukung adanya *good corporate governance* dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan *good corporate governance* memiliki kemungkinan yang sangat kecil dalam melakukan penghindaran pajak karena memiliki pengawasan dan pengontrolan yang baik dalam perusahaan tersebut.

Kepemilikan Institusional secara negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh institusional di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Sehingga jika jumlah kepemilikan saham institusional dalam perusahaan rendah maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan meningkat. Penyebabnya

adalah kepemilikan saham oleh institusional akan cenderung membuat kinerja dari manajemen perusahaan diawasi oleh investor institusi tersebut, hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak terutang oleh perusahaan.

Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode akuntansi yang konservatif tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah (1) bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan sampel perusahaan dibidang lain untuk menggeneralisasi dan memperoleh hasil yang lebih valid serta mempertinggi daya uji empiris.(2) disarankan untuk melakukan penelitian yang serupa dengan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberikan jumlah sampel yang lebih besar dan kemungkinan memperoleh kondisi yang sebenarnya. (3) bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang pengukuran penghindaran pajak untuk menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga

kemampuan hasil penelitian semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, L. K. (2019). *Intensity, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan Manajerial, dan Jenis KAP Terhadap Pengungkapan Aset Biologis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Annisa, N.S., & Kurniasih, L. (2012). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol.8,95-189
- Astrian, Afri. 2015. *Pengaruh Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta.
- Bernandhi, Riza. 2013. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan*. Universitas Diponegoro.
- Budiman, Judi dan Setiyono. 2012. *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *Electronic Theses & Dissertations (ETD)* Universitas Gajah Mada.
- Chen, K. P, dan Chu, C. Y. C. 2010. *Internal Control vs External Manipulation: A*

- Model of Corporate Income Tax Evasion*. Rand Journal of Economics.
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2007. *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. Journal of Financial Economics.
- Efendi, Arif, Muhammad. 2016. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Givoly, D. dan Hayn, C. 2002. *Rising Conservatism: Implication for Financial Analysis*. *Financial Analysts Journal*, 56-74.
- Hanum, H.R & Zulaikha, 2013. *Pengaruh Karakteristik Coporate Governance Terhadap Efektivitas Tax Rate Study Empiris pada BUMN 2009-2011*. ISSN. 2 halaman 1-19.
- Ikatan Komite Audit Indonesia. 2006. *Manual Komite Audit*. Jakarta: Ikatan Komite Audit Indonesia
- Khurana, Inder K dan William J Mosser. 2012. *Institusional Shareholders Investment Horizons and Tax Avoidance*. *Social Science Research Network*.
- Kusumawardhani, Indra. 2012. *Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba*. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 9, No. 1: 41-54.
- Novi Sundari. 2017. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Instensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak*. *JRAK* Vol. 8 No. 1 Februari 2017 Hal. 85-109.
- Nurindah, W. Utami. 2013. *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan terhadap Tax Avoidance*. *UNS-F. Ekonomi Jur. Akuntansi-F1310067-2013*
- Nurjannah. 2017. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderating*. UIN Alauddin.
- Pohan, Anwar, Chairil. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Cetakan keempat. Kompas Gramedia, Jakarta.
- Pramudito, B. Wiryo. 2015. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisari terhadap Penghindaran Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Prasetyo, Widyo Iswara. 2014. *Corporate Gorvenance Dan Kinerja Perusahaan*, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* vol. 2, no. 2, 2014, 121-131.

- Saputra, Moses Dicky dan Nur Fadrijih. 2017. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. ISSN. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 8. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. www.ssrn.com..
- Tresno, Jaya. 2012. *Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi dan Tax Avoidance*. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007.
- Winata. 2014. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.
- Yulistian, Andika. 2018. *Pengaruh Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Riau.